
Kebijakan Agraria Pada Masa Orde Baru: Implikasi Program Revolusi Hijau Terhadap Petani Indonesia

Wido Sumantri^{a, 1 *}, Dede Wahyu Firdaus^{b, 2}

^a Program Studi Pendidikan Sejarah, FKIP, Universitas Siliwangi, Tasikmalaya

¹ sumantriwido08@gmail.com; ² dede.firdaus@unsil.ac.id;

* Corresponding author

Abstrak

Sejak era Orde Baru dimulai, kebijakan agraria di Indonesia mengalami transformasi yang signifikan melalui implementasi Program Revolusi Hijau. Program ini bertujuan dalam rangka meningkatkan produktivitas pangan terutama beras sehingga dapat mencukupi kebutuhan domestik dan juga agar Indonesia bisa mencapai swasembada pangan. Kebijakan ini lahir dari rencana pemerintah untuk memperkuat ketahanan pangan dan mengembangkan modernisasi di sektor pertanian. Namun, di balik kesuksesannya, terdapat implikasi yang kompleks bagi petani, terutama dalam bidang sosial ekonomi. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis dampak kebijakan agraria pada masa Orde Baru, terutama terkait Revolusi Hijau, terhadap petani di Indonesia. Penulisan artikel ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik studi pustaka, yang mana sumber data pada artikel ini yaitu sumber sekunder yang berasal dari artikel ilmiah, jurnal, maupun sumber internet. Pembahasan utama meliputi latar belakang, penerapan, dan implikasi program Revolusi Hijau terhadap para petani di Indonesia.

Kata Kunci: Orde Baru, Revolusi Hijau, Petani

Abstract

Since the beginning of the New Order era, agrarian policies in Indonesia have undergone significant transformation through the implementation of the Green Revolution Program. This program aims to increase food productivity, particularly rice, to meet domestic needs and to achieve national self-sufficiency in food production. This policy stemmed from the government's plan to strengthen food security and to develop modernization in the agricultural sector. However, behind its success, there are complex implications for farmers, especially in socio-economic aspects. This article aims to analyze the impact of agrarian policies during the New Order era, particularly related to the Green Revolution, on farmers in Indonesia. The writing of this article uses a qualitative method with literature study techniques, where the data sources in this article are secondary sources from scientific articles, journals, and internet sources. The main discussion includes the background, implementation, and implications of the Green Revolution program for farmers in Indonesia.

Keywords: New Order, Green Revolution, Farmers

PENDAHULUAN

Kondisi agraria di Indonesia pasca kemerdekaan ditandai dengan kesenjangan yang cukup besar pada kepemilikan dan penguasaan tanah. Masalah ketimpangan tersebut muncul sebagai warisan sistem kolonial yang meninggalkan pengelolaan sumber agraria yang tidak adil dan struktur agraria yang tidak merata. Sebagian besar kepemilikan tanah hanya dikuasai oleh kaum elit dan perusahaan

asing. Menanggapi masalah tersebut, pemerintah melakukan penataan ulang pada struktur agraria, yang kemudian dikenal dengan reforma agraria.

Reforma agraria memiliki program lanjutan seperti pendidikan teknologi pada pertanian dan produksi, pemasaran, dan permodalan. Reforma agraria bertujuan untuk menciptakan distribusi yang adil dan merata atas tanah sebagai sumber penghidupan bagi petani, sehingga diharapkan dapat terwujud pembagian hasil adil dan merata pula. Penataan ulang yang dilakukan tidak hanya terkait fungsi dan kegunaan tanah, tapi juga struktur sosial yang muncul karena adanya struktur agraria (Aprianto, 2021).

Upaya pemerintah pada era Orde Lama dalam menata ulang struktur agraria yaitu dengan mengesahkan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) pada tahun 1960. UUPA terbentuk karena hukum agraria pada masa penjajahan tidak mampu memberikan kepastian hukum bagi rakyat Indonesia. Dengan demikian, dibutuhkan suatu hukum agraria nasional yang berakar pada prinsip-prinsip dasar hukum adat mengenai tanah, mampu memberikan kepastian hukum bagi masyarakat Indonesia, serta tetap mempertimbangkan nilai-nilai yang sejalan dengan hukum agama. UUPA 1960 bertujuan untuk menciptakan keadilan struktur agraria melalui pembatasan kepemilikan tanah dan perlindungan terhadap petani kecil (Kausan, 2017). Namun, implementasi UUPA 1960 tidak dapat berjalan dengan baik mengingat bangsa Indonesia mengalami masa kelam pada tahun 1965. Tragedi pada tahun 1965 juga menandai peralihan era dari Orde Lama menjadi Orde Baru.

Pada awal Orde Baru, pemerintah memprioritaskan kebijakan agraria untuk mendukung laju pertumbuhan ekonomi nasional melalui sektor pertanian. Salah satu program yang dicanangkan adalah Revolusi Hijau yang bertujuan meningkatkan produktivitas pangan nasional, terutama beras, guna mencapai swasembada pangan. Revolusi Hijau mencakup serangkaian kebijakan yang berorientasi pada modernisasi pertanian, seperti penerapan teknologi intensif, penggunaan benih unggul, distribusi pupuk kimia, pengendalian hama dengan pestisida, serta pembangunan infrastruktur irigasi yang masif (Ramadhani, 2023).

Revolusi Hijau dipandang sebagai solusi atas masalah pangan yang dihadapi Indonesia pada awal Orde Baru. Dengan populasi yang terus bertambah, kebutuhan akan pangan meningkat pesat. Pemerintah melihat teknologi modern sebagai cara untuk meningkatkan efisiensi pertanian dan mengurangi ketergantungan pada impor pangan. Program ini menjadi salah satu langkah pemerintah dalam rangka menanggulangi kemiskinan dengan cara mendorong modernisasi pada sektor pertanian (Gultom & Harianto, 2021).

Pemerintah memberikan subsidi besar-besaran untuk pupuk kimia, benih unggul, dan pestisida. Selain itu, pelatihan diberikan kepada petani untuk mengadopsi metode baru ini. Dalam jangka pendek, kebijakan ini mampu meningkatkan produktivitas pangan secara signifikan, sehingga Indonesia pernah mencapai status sebagai negara swasembada beras pada tahun 1984. Namun, dalam jangka panjang, ketergantungan pada input mahal dan teknologi asing menciptakan masalah baru.

Ketergantungan yang tinggi terhadap input pertanian modern menciptakan beban ekonomi yang berat, karena biaya produksi menjadi lebih mahal, sementara akses terhadap subsidi sering kali tidak merata. Modernisasi pertanian justru memperburuk kesenjangan sosial masyarakat pedesaan. Kelompok petani yang memiliki modal besar semakin memperoleh keuntungan, sedangkan kondisi petani kecil justru mengalami kemerosotan. Kesenjangan ini terjadi karena teknologi dan fasilitas yang tersedia lebih banyak dijangkau oleh kelompok menengah ke atas, yaitu para pemilik lahan luas. Mereka memperoleh akses terhadap modal berbunga rendah, subsidi pupuk, serta pendampingan. Sementara itu, kelompok masyarakat bawah semakin tertinggal dan terpinggirkan (Gultom & Harianto, 2021).

Dampak Revolusi Hijau pada ekologis juga tidak dapat dihindarkan, penggunaan pupuk kimia dan pestisida secara berlebihan mengakibatkan degradasi kualitas tanah, hilangnya keanekaragaman hayati, serta pencemaran air. Program Revolusi Hijau juga menimbulkan dampak sosial yang signifikan, seperti meningkatnya ketimpangan antara petani kecil dan pemilik modal besar, serta menurunnya kedaulatan petani terhadap sumber daya agraria. Dalam jangka panjang, pola pembangunan agraria yang lebih mengutamakan pertumbuhan produksi dibandingkan kesejahteraan petani justru memperlebar kesenjangan sosial ekonomi di pedesaan.

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan, pembahasan pada artikel ini akan difokuskan pada analisis mendalam mengenai latar belakang, implementasi serta dampak Revolusi Hijau terhadap petani di Indonesia. Dibalik keberhasilan Revolusi Hijau dalam meningkatkan produksi pertanian, dampak jangka panjang yang cenderung merugikan menjadi bencana bagi para petani kecil yang semakin terpuruk karena adanya modernisasi pertanian. Atas dasar hal tersebut, penulis bermaksud meneliti implikasi pelaksanaan program Revolusi Hijau serta pengaruhnya terhadap kehidupan petani di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif yang berfokus pada pemahaman mendalam terhadap suatu isu, bukan sekadar mencari hasil yang dapat digeneralisasikan. Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji peristiwa atau fenomena tertentu dalam kehidupan individu atau kelompok (Rusandi & Rusli, 2021). Melalui metode kualitatif deskriptif, penulis memberikan penjelasan mengenai kebijakan agraria era Orde Baru khususnya pada program Revolusi Hijau serta dampak yang ditimbulkan terhadap para petani di Indonesia. Penulis menggunakan teknik studi pustaka untuk pencarian data yang diperlukan, dengan cara mengumpulkan sumber literatur sebagai bahan penulisan, baik dari sumber primer maupun sekunder (Darmalaksana, 2020). Data sekunder yang digunakan meliputi jurnal, artikel, dan berbagai referensi valid serta relevan dengan topik penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Latar Belakang Revolusi Hijau

Revolusi Hijau merupakan perubahan skala global dalam sistem agraria yang berlangsung dari tahun 1950-an hingga 1980-an dengan tujuan untuk memodernisasi pertanian sehingga dapat meningkatkan produksi pangan. Cikal bakal gagasan Revolusi Hijau diawali oleh pemikiran Thomas Robert Malthus, yang menyatakan bahwa kemiskinan terjadi akibat pertumbuhan penduduk yang pesat tidak diimbangi dengan produksi pangan yang mencukupi. Solusi yang ditawarkan Malthus dalam permasalahan tersebut yaitu pengendalian populasi penduduk dan meningkatkan produksi pangan melalui penggunaan bibit unggul (Nubatonis, 2024).

Seorang agronom dari Amerika Serikat bernama Norman Borlaug berperan penting dalam Revolusi Hijau, yang memperkenalkan teknologi pertanian modern di Meksiko pada 1940-an. Melalui usahanya, Meksiko yang semula bergantung pada impor gandum berhasil bertransformasi menjadi negara pengekspor dalam kurun waktu dua puluh tahun. Selain itu, Borlaug mendorong penerapan pupuk kimia dan sistem irigasi modern, serta mengembangkan varietas gandum baru yang mampu meningkatkan produktivitas secara signifikan. Metode yang dikembangkannya kemudian diadopsi oleh banyak negara lain, seperti Pakistan, Turki, dan Afghanistan (Nugroho, 2018).

Perkembangan Revolusi Hijau semakin pesat berkat dukungan Yayasan Ford dan Rockefeller, yang berperan dalam menciptakan berbagai inovasi pertanian, termasuk pengembangan benih berkualitas, penggunaan pupuk dan pestisida, serta sistem irigasi yang lebih efektif. Kedua yayasan ini memainkan peran kunci dalam penyebaran teknologi modern yang diharapkan dapat mengatasi masalah pangan global, terutama di negara-negara berkembang yang sering kali mengalami kesulitan bahan pangan. Program-program yang mereka jalankan bertujuan untuk mentransformasi praktik pertanian tradisional dengan metode yang lebih efisien dan produktif. Pasca Dunia II berakhir, Revolusi Hijau mulai dilakukan secara intens di beberapa negara seperti India dan Filipina. Di Indonesia, Revolusi Hijau mulai diperkenalkan pada masa Orde Baru sebagai solusi untuk mengatasi krisis beras yang terjadi sebelum Orde Lama runtuh. Pemerintah Orde Baru mengimpor teknologi pertanian baru dari IRRI di Filipina dan berupaya menciptakan stabilitas ekonomi dan politik melalui berbagai program pembangunan. Pelaksanaan Revolusi Hijau di Indonesia memicu perubahan signifikan yang dicapai melalui berbagai tahap pembangunan di sektor pertanian (Hanifah, dkk, 2024).

Revolusi Hijau mulai dicanangkan pada tahun 1968 dengan tujuan meningkatkan produktivitas pangan di Indonesia, khususnya beras. Revolusi Hijau yang juga dikenal dengan Bimbingan Massal memiliki beberapa program yang berupa Panca Usaha Tani yaitu: a) penggunaan bibit unggul pada pertanian, b) pemupukan, c) pengendalian hama dan penyakit, d) irigasi, dan e) perbaikan metode bercocok tanam (Ramadhani, 2023). Program Bimbingan Massal kemudian berubah dan mengalami perkembangan menjadi Intensifikasi Massal dengan kebijakannya yaitu subsidi bibit unggul, pupuk, pestisida, dan bantuan teknologi (Djori, 2024).

2. Implementasi Revolusi Hijau Pada Masa Orde Baru

Revolusi Hijau yang juga dikenal dengan program Panca Usaha Tani dilaksanakan melalui Bimbingan Massal dan Intensifikasi Massal dengan dukungan penuh dari penyuluh pertanian lapangan.

Pemerintah menunjang pelaksanaannya dengan membentuk proyek besar untuk memperbaiki infrastruktur pengairan dan mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 1973 tentang pendirian Badan Usaha Unit Desa/Koperasi Unit Desa (BUUD/KUD). BUUD/KUD berperan dalam penyediaan modal melalui kredit, pengelola hasil pertanian dengan sarana yang tersedia, penyuluhan, serta pemasaran hasil produksi. (Styawan, 2022).

Penerapan awal Revolusi Hijau dimulai dengan praktik lapangan mahasiswa Institut Pertanian Bogor (IPB) selama satu bulan sebelum musim tanam. Program ini dimaksudkan untuk memperkenalkan konsep Panca Usaha Tani, dengan penekanan pada penerapan Demonstration Plot (Demplot) di Karawang, yang terbukti mampu meningkatkan hasil produksi secara signifikan. Keberhasilan pola Demplot ini kemudian diperluas ke berbagai provinsi dan diadopsi sebagai program pemerintah dalam menambah produksi padi melalui program Bimbingan Massal. (Rinardi, dkk, 2019).

Pemerintah Orde Baru mengembangkan program ini menjadi penyuluhan massal yang bertujuan meningkatkan produksi pertanian melalui intensifikasi, sekaligus mendorong kesejahteraan petani (Nugroho, 2018). Program tersebut tidak hanya melibatkan Departemen Pertanian, tetapi juga berbagai instansi pemerintah untuk mendukung swadaya petani melalui penerapan Panca Usaha, pembinaan, pengolahan, dan pemasaran hasil pertanian, serta pembangunan desa (Rinardi, dkk, 2019). Panca Usaha meliputi berbagai aspek, seperti pengelolaan irigasi secara efisien, penggunaan benih berkualitas tinggi, pemberian pupuk, pengendalian hama dan penyakit, serta penerapan metode penanaman yang tepat, yang kemudian berkembang menjadi konsep Sapta Usaha.

Modernisasi pertanian di Indonesia di bawah program Revolusi Hijau berhasil meningkatkan hasil tanaman pangan secara signifikan. Contohnya, produksi kapas meningkat sebesar 126% pada tahun 1974, produksi beras sebesar 6%, dan palawija serta tanaman hortikultura masing-masing meningkat sebesar 15%. Selain itu, penggunaan pupuk, pestisida, dan alat pertanian juga meningkat signifikan (Nugroho, 2018). Kemampuan swasembada beras pada tahun 1984 menjadi pencapaian utama dalam upaya memenuhi kebutuhan pangan domestik, dengan produksi beras mencapai angka 25,5 juta ton. Selama periode lima tahun, produksi beras di tingkat nasional meningkat pesat, dari 22,3 juta ton pada tahun 1981 menjadi 26,6 juta ton pada tahun 1986. Berkat pencapaian tersebut, Presiden Soeharto dianugerahi penghargaan dan diberikan kehormatan untuk berpidato dalam peringatan Ulang Tahun organisasi Food and Agricultural Organization ke-40 yang berlangsung di Roma (Styawan, 2022).

Namun, keberhasilan Revolusi Hijau juga memunculkan kritik mengenai dampak sosial dan lingkungan dari penerapan teknologi pertanian intensif tersebut. Produksi beras menurun setelah tahun 1986, dan untuk memenuhi kebutuhan pangan, pemerintah terpaksa mengimpor beras pada akhir tahun 1988. Selain itu, peningkatan penggunaan pupuk buatan dan pestisida mengakibatkan dampak negatif terhadap lingkungan, yang mengharuskan pemerintah untuk membangun industri petrokimia dalam skala besar guna memenuhi kebutuhan pupuk (Hanifah, dkk, 2024). Dengan demikian, Revolusi Hijau di Indonesia merupakan upaya besar dalam modernisasi pertanian yang berhasil meningkatkan

produksi pangan dan kesejahteraan petani, meskipun menghadapi tantangan dan kritik terkait dampak jangka panjangnya.

3. Implikasi Revolusi Hijau Bagi Petani Indonesia

Revolusi Hijau di Indonesia, yang berlangsung dari tahun 1969 hingga 1998, membawa dampak signifikan pada sektor pertanian dan kehidupan sosial ekonomi masyarakat pedesaan. Revolusi Hijau di satu pihak mampu meningkatkan hasil produksi beras melalui penerapan teknologi modern serta pelaksanaan program intensifikasi pertanian (Styawan, 2022). Meski demikian, Revolusi Hijau juga membawa konsekuensi negatif, khususnya terkait ketimpangan dalam distribusi keuntungan serta munculnya dampak sosial ekonomi yang memperlebar lapisan sosial di masyarakat.

Pelaksanaan sejumlah program dalam Revolusi Hijau, seperti intensifikasi pertanian, kegiatan penyuluhan, serta pemberian kredit usaha tani, telah mendorong transformasi metode budidaya padi menuju sistem yang lebih modern. Penggunaan teknologi baru dalam pertanian menjadi lebih intensif, menggantikan metode tradisional yang sebelumnya digunakan oleh petani. Namun, modernisasi ini lebih menguntungkan petani kaya yang memiliki akses terhadap aset tanah dan modal yang lebih besar dibandingkan petani miskin. Petani yang memiliki modal besar mampu menanggung risiko kegagalan panen dan meningkatkan hasil produksinya melalui penyewaan lahan, meskipun kondisi tersebut tidak berujung pada kepemilikan tanah, melainkan pada penguasaan lahan (Kandar, 2014).

Di sisi lain, kesejahteraan petani miskin dan buruh tani tidak mengalami peningkatan. Mereka hanya mampu mengolah lahan pertanian kurang dari setengah hektar, serta minimnya modal, dan infrastruktur pertanian yang tidak memadai. Penggunaan alat pertanian tradisional dan bibit yang tidak berkualitas menyebabkan produktivitas mereka rendah. Selain itu, tanah yang terus dieksploitasi tanpa pemupukan yang baik mengakibatkan kesuburan tanah menurun, ditambah dengan gangguan hama dan penyakit yang lebih sering terjadi (Gultom & Harianto, 2019). Pemasaran hasil pertanian yang tidak jelas dan harga yang dipermainkan oleh tengkulak juga menambah beban ekonomi petani miskin.

Modernisasi pertanian berdampak pada meningkatnya kesenjangan, di mana petani kaya semakin makmur, sedangkan petani kecil justru menghadapi tekanan yang lebih besar. Fasilitas kredit yang murah dan mudah hanya dapat diakses oleh petani kaya, yang juga memiliki kemampuan untuk mengadopsi teknologi pertanian modern yang memerlukan biaya besar. Mereka memiliki akses yang lebih dekat dengan pejabat desa dan penyuluh pertanian, sehingga menjadi pihak pertama yang menerima informasi tentang teknologi baru. Sebaliknya, petani kecil, karena sempitnya lahan yang dimiliki dan rendahnya pendapatan, enggan mengambil risiko dengan teknologi baru dan seringkali ketinggalan dalam penggunaan teknologi tersebut (Rinardi, dkk, 2019).

Revolusi Hijau juga membawa perubahan signifikan dalam struktur sosial di komunitas agraris. Transformasi dalam hubungan sosial antara petani, peningkatan mobilitas sosial, dan evolusi sistem nilai masyarakat adalah beberapa perubahan sosial yang terjadi. Model kepemilikan tanah tradisional berubah dengan adanya konsolidasi lahan dan penguatan agribisnis besar, yang berdampak negatif pada petani kecil. Selain itu, komersialisasi pertanian membatasi akses sumber daya bagi masyarakat

lokal dan lingkungan, serta mengubah peran gender dan struktur keluarga di komunitas agraris (Makaborang, 2024). Secara keseluruhan, Revolusi Hijau telah membawa perubahan besar dalam sektor pertanian dan kehidupan sosial ekonomi masyarakat pedesaan di Indonesia. Namun, perubahan tersebut turut memperbesar kesenjangan sosial dan ekonomi antara petani kaya dan miskin, sekaligus memunculkan dampak sosial yang rumit pada masyarakat agraris.

KESIMPULAN

Revolusi Hijau adalah reformasi global dalam sistem pertanian yang terjadi dari tahun 1950-an hingga 1980-an. Dimulai dengan gagasan Thomas Robert Malthus tentang pengendalian pertumbuhan penduduk dan peningkatan produksi pangan, Revolusi Hijau kemudian dipelopori oleh Norman Borlaug yang memperkenalkan teknologi pertanian modern di Meksiko dan berkembang dengan dukungan Yayasan Ford dan Rockefeller. Di Indonesia, Revolusi Hijau diperkenalkan pada masa Orde Baru sebagai solusi krisis beras, dengan program Bimbingan Massal dan Intensifikasi Massal yang mencakup penggunaan bibit unggul, pupuk, pestisida, irigasi, dan metode penanaman yang lebih baik. Penerapan Revolusi Hijau di Indonesia berhasil meningkatkan produksi pangan secara signifikan, termasuk mencapai swasembada beras pada tahun 1984. Namun, keberhasilan ini juga diiringi oleh kritik terhadap dampak sosial dan lingkungan dari teknologi pertanian intensif yang diterapkan. Dampak negatif tersebut mencakup stratifikasi sosial, di mana petani kaya lebih diuntungkan dibandingkan petani miskin yang mengalami kesulitan dalam mengakses teknologi baru dan kredit pertanian. Kesenjangan ini memperburuk kondisi ekonomi petani miskin dan buruh tani tak bertanah. Selain itu, Revolusi Hijau juga membawa perubahan signifikan dalam struktur sosial di komunitas agraris, termasuk transformasi hubungan sosial, peningkatan mobilitas sosial, dan evolusi sistem nilai masyarakat. Konsolidasi lahan dan penguatan agribisnis besar berdampak negatif pada petani kecil, serta komersialisasi pertanian membatasi akses sumber daya bagi masyarakat lokal dan lingkungan. Meskipun Revolusi Hijau berhasil meningkatkan produksi pangan dan kesejahteraan petani secara umum, dampak sosial dan ekonomi yang timbul memerlukan perhatian lebih terkait pendekatan yang berkelanjutan dalam pembangunan sektor pertanian di masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

- Aprianto, Tri Chandra. 2021. Pelaksanaan Agenda Reforma Agraria Awal Masa Orde Baru (1967-1973). *Historia*, 3(2), 397-414.
- Darmalaksana, Wahyudin. 2020. Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka dan Studi Lapangan. PrePrint Digital Library UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Gultom, Ferdi., & Harianto, Sugeng. 2021. Revolusi Hijau Merubah Sosial-Ekonomi Masyarakat Petani. *Temali: Jurnal Pembangunan Sosial*, 4(2), 145-154.
- Hanifah, Zahra Maulidya, dkk. 2024. Pengaruh Revolusi Hijau Pada Masa Orde Baru di Indonesia. *Sindoro: Cendikia Pendidikan*, 5(4), 1-10.

- Kandar, Ii Rubi. 2016. Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Gunungkidul Masa Revolusi Hijau (1970-1974). *Risalah*, 3(11).
- Kausan, B. K., 2017. Politik Agraria Masa Orde Baru. Makalah Sejarah Politik, Universitas Negeri Semarang.
- Nubatonis, L. M. Djori, M. R. B., dkk. 2024. *Revolusi Hijau: Transformasi Pertanian Menuju Kemandirian Pangan*. Penerbit Tahta Media.
- Nugroho, Wahyu Budi. 2018. Konstruksi Sosial Revolusi Hijau di Era Orde Baru. *Journal on Socio Economics of Agriculture and Agribusiness* Vol, 12(1), 55.
- Ramadhani, Wahyu Dwi. 2023. Mengatasi Masalah dengan Transformasi Teknologi di Sektor Pertanian untuk Mewujudkan Ketahanan Pangan Nasional yang Berkelanjutan. *Journal of Economics Development Issues*, 6(2), 87-94.
- Rinardi, Haryono. 2019. Dampak Revolusi Hijau dan Modernisasi Teknologi Pertanian: Studi Kasus Pada Budi Daya Pertanian Bawang Merah di Kabupaten Brebes. *Jurnal Sejarah Citra Lekha*, 4(2), 125-136.
- Rusandi & Rusli, Muhammad. 2021. Merancang Penelitian Kualitatif Dasar/Deskriptif dan Studi Kasus. *Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*, 2(1), 48-60.
- Styawan, Aris Agus. 2022. Pengaruh Revolusi Hijau Terhadap Perubahan Sosial Ekonomi Petani di Kabupaten Karanganyar Tahun 1969-1998. *Kalpataru: Jurnal Sejarah dan Pembelajaran Sejarah*, 8(1).
- Sutadi, Rayyan Dimas, dkk. 2021. Kebijakan Reforma Agraria di Indonesia (Kajian Komparatif Tiga Periode Pelaksanaan: Orde Lama, Orde Baru, dan Orde Reformasi). *Jurnal Tunas Agraria* Vol. 1(1), 193-218.